BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Bukan hal yang aneh, jika penggunaan kendaraan dinas operasional pelat merah sering dipergunakan bukan dalam jam kerja dan untuk kepentingan dinas, bahkan hal tersebut dapat terlihat di tempat-tempat wisata digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional. Padahal keberadaan kendaraan dinas harus dipergunakan dalam rangka kepentingan dinas untuk memperlancar pelaksanaan fungsi pelaksanaan dinas. Seharusnya kendaraan dinas hanya dipergunakan pada hari kerja yaitu senin sampai dengan jumat, dan hari lain apabila dalam rangka pelaksanaan tugas dinas, ironisnya bahkan kendaraan dinas juga sering terlihat digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak penggunaan kendaraan dinas, baik keluarga atau kerabat.

Penggunaan kendaraan dinas diluar pelaksanaan tugas dinas dapat terlihat secara jelas pada saat hari libur terutama hari libur besar, bahkan hari minggu sering ditemukan ditempat-tempat pusat perbelanjaan, sebagaimana sering ditemukan di Kota Cimahi, namun hal tersebut dianggap biasa tanpa ada pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya pengguna kendaraan dinas pada saat digunakan bukan untuk kepentingan dinas justru malah merasa bangga, karena merasa dirinya atau keluarganya merupakan pejabat. Akan lebih baik jika pejabat mampu segera mengembalikan konsepsi kendaraan dinas sebagai fasilitas atau alat bantu para penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Penyalahgunaan atau ketidaktepatan pemanfaatan kendaraan dinas operasional milik negara yang dibiayai oleh rakyat, akan menciderai perasaan rakyat (*common sense*). Selain tidak etis, sebenarnya penggunaan kendaraan dinas yang tidak tepat manfaat akan mengakibatkan “*alienasi*” penyelenggaraan negara dengan masyarakat yang melihatnya.

Penyelenggara negara yang menggunakan kendaraan dinas diluar keperluan dinas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya. Ada kebanggaan tersendiri bagi para beberapa penyelenggara negara yang menggunakan kendaraan dinas bukan untuk keperluan dinas padahal sebenarnya mampu membeli kendaraan pribadi yang jauh lebih mewah. Seringkali kendaraan pribadinya hanya disimpan di dalam garasi, jarang dikeluarkan, paling sesekali saja dipanasi mesinnya. Untuk keperluan pribadi dan keluarga, lebih memilih menggunakan kendaraan dinas.

Ironisnya kendaraan dinas operasional milik negara yang seharusnya disimpan dan diamankan di garasi instansi atau kantor selepas jam kerja, dibawa pulang ke rumah. Namun bagi yang garasinya tidak mencukupi ,hanya diparkir di luar garasi yang seringkali pengamanannya hanya seadanya, sedangkan bahan bakar minyak, biaya perawatan, perbaikan, pajak, masih dibayarkan dengan anggaran negara. Bahkan bagi yang diasuransikanpun, premi asuransi dibayar dengan anggaran negara,tetapi jika kendaraan dinas hilang di rumah kediaman, bukan di garasi kantor,(yang seperti ini kasusnya semakin banyak), kerugian negara yang dibebankan kepada penyelenggara negara yang membawa pulang

kendaraan dinas adalah nilai kendaraan pasaran saat kejadian kehilangan (bukan nilai perolehan asset) dikurangi klaim pertanggungans asuransi.

Penggunaan kendaraan operasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoaman Pelaksana Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan operasional, akan tetapi pelanggaran terus terjadi sampai saat ini. Sebagai contoh Saudara Efi Hanifah adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang mendapatkan fasilitas mobil dinas sebagai kendaraan operasional, yang ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan tersebut bahwa mobil tersebut digunakan diluar jam kerja untuk berbelanja dan mengantar keluarganya, bahkan mobil dinas tersebut dipergunakan untuk mudik lebaran.

Pelanggaran tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa saat mobil tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi juga menggunakan uang negara untuk membeli bahan bakarnya, padahal dalam lampiran II Permen PAN No 8 Tahun 2005 huruf A poin 5 dinyatakan, bahwa Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan tugas sesuai kompetensinya, akan tetapi pada praktiknya tidak ada sanksi apapun terhadap pelanggaran tersebut.

Lampiran I Permen PAN No 8 Tahun 2005 juga mengamanatkan bahwa aparatur negara harus memberikan keteladanan yang baik terhadap pelaksanaan peraturan, seperti yang dinyatakan dalam Lampiran I huruf B poin 1 menyatakan, “Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan sebagai abdi negara dan subjek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan, harus berperan menjadi agen pembaharu dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja, penghematan dan penegakan disiplin kerja masyarakat dan bangsa, melalui inisiatif, ketokohan, panutan dan keteladanan”, jadi sudah selayaknya para aparatur negara memberikan contoh yang baik dalam hal ini tentang penggunaan kendaraan operasional, karena kendaraan dan bahan bakar minyak kendaraan tersebut dibiayai dengan uang negara yang salah satu sumbernya adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat, jadi sudah seharusnya fasilitas tersebut dipergunakan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai kendaraan operasional dinas yang hanya digunakan untuk kepentingan dinas bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Lemahnya pengawasan dari aparat Pemerintahan Daerah Kota Cimahi dalam rangka memonitor penyalahgunaan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi mengakibatkan banyaknya penggunaan kendaraan dinas di berbagai tempat, hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat tentang penggunaan kendaraan dinas, yang seharusnya Pemerintah Kota Cimahi membentuk kebijakan tentang penggunaan kendaraan dinas dan menjalankan fungsi pengawasan.

Sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan diluar dinas selain tidak etis juga karena tidak

sesuai dengan peruntukan disediakannya kendaraan dinas tersebut. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, selain itu, penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi juga bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pengelolaan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penyalahgunaan wewenang Pejabat Daerah Kota Cimahi dalam menggunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena pejabat sebagaimana dimaksud telah menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu penggunaan mobil dinas yang melekat pada jabatannya bukan dalam rangka untuk kepentingan dinas.

Diperlukan terobosan agar penggunaan kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan dinas, bukan masalah regulasi, sistem, mekanisme yang harus dilengkapi, namun juga harus ada pembangunan kualitas manusia baik ke dalam yaitu para penyelenggara negara, maupun ke luar yaitu masyarakat sipil, pers, dan NGO sebagai partner pemerintah. dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen, integritas, moralitas, kepemimpinan, dan keteladanan, agar kebijakan ini benar-benar dapat menjadi kebijakan untuk kebaikan bersama. Setiap penyelenggara negara harus ditumbuhkan rasa malu jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan terus diasah kepekaan "*common sense*", agar lebih

berhati-hati dan tidak lagi menciderai perasaan masyarakat, demikian juga masyarakat kita juga harus diasah rasa kepedulian, partisipasi, kritis dan rasa ingin memiliki (*sense of belonging*), terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, mengubah mindset dari membenarkan yang lazim menjadi melazimkan yang benar.

Dengan alasan tersebut di atas akhirnya penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam sebuah karya tulis berupa penulisan hukum, dalam bentuk memorandum hukum dengan judul :“ **Pendapat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatkan Efisiensi.** “